SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 120 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 21);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam rangka mencapai hasil *(outcome)* suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II
PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e. Penutup; dan

f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
    a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
    b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
    c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV
PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 120

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
BANDUNG
NOMOR 120 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

Pemerintah
Kabupaten Bandung

BUPATI BANDUNG

PERATURAN



PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025



BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Raya Soreang Km. 17, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
E-mail: bkad@bandungkab.go.id Website: https://bkad.bandungkab.go.id/

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Nomor :
Lampiran : 2 (Dua)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 15 ayat (1) menyatakan Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah ;

b. bahwa untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan implementasi dari Rencana Srategis Badan Keuangan dan Aset Daerah dibutuhkan suatu Tim ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 21);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 109 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025, sebagaimana Lampiran I Keputusan ini ;

KEDUA : Tugas pokok Tim sebagaimana pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 2025

KEPALA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ERWAN KUSUMA HERMAWAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BKAD TAHUN 2025

Pengarah	:	Kepala Badan
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Badan
Ketua	:	Ratna Wulansari, SE.,MM (Perencana Ahli Muda
Sekretaris	:	Hj. Sri Mulyani Hanipah A.Md (Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Sekretariat)
Anggota	:	1. Kepala Bidang Anggaran
		2. Kasubid Penyusunan Anggaran I
		3. Kasubid Penyusunan Anggaran II
		4. Pipin Aripin, SE (Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Anggaran)
		5. Kepala Bidang Perbendaharaan
		6. Kasubid Administrasi Perbendaharaan
		7. Kasubid Kas Daerah
		8. Erna Suciati Agustiani, S.Sos (Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Perbendaharaan)
		9. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
		10. Kasubid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I
		11. Kasubid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II
		12. Evy Rachmawaty, SE.,MM (Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Akuntansi)
		13. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
		14. Kasubid Penilaian dan Penghapusan
		15. Kasubid Inventarisasi dan Pelaporan
		16. Kristin Martiana, SH (Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Pengelolaan BMD)
		17. Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kesekretariatan	:	1.	Agus Ricky Permana S.Sos (JFU pada Perencana)
		2.	Suhita Hera Margana S.Sos., M.Si (JFU pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)

KEPALA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ERWAN KUSUMA HERMAWAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

TUGAS POKOK TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BKAD

I. PENGARAH

Memberikan arahan kepada tim dalam melaksanakan penyusunan Perubahan Renja

II. PENANGGUNG JAWAB

Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Penyusunan Perubahan Renja.

III. KETUA

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan Perubahan Renja.
2. Mengendalikan seluruh kegiatan penyusunan Perubahan Renja.
3. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BKAD.

IV. SEKRETARIS

1. Membantu ketua mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan Perubahan Renja.
2. Membantu ketua mengendalikan seluruh kegiatan penyusunan Perubahan Renja.
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Perubahan Renja kepada ketua.

V. ANGGOTA

1. Mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dalam penyusunan Perubahan Renja.
2. Memberikan arahan teknis dalam penanganan dan pengendalian dalam penyusunan Perubahan Renja.
3. Mengkaji data-data yang terkumpul sebagai bahan penyusunan Perubahan Renja.

VI. KESEKRETARIATAN

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi ketatausahaan pelaksanaan tugas.

2. Memberikan pelayanan teknis administrasi.
3. Menyelenggarakan rapat-rapat pelaksanaan kebijakan berdasarkan petunjuk Sekretaris.
4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

KEPALA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ERWAN KUSUMA HERMAWAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung ini dapat disusun dengan baik.

Renja Perubahan ini disusun sebagai tindak lanjut atas dinamika pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, serta menyesuaikan dengan perubahan arah kebijakan, kondisi aktual, dan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah pada tahun anggaran berjalan, yang mencerminkan kebutuhan penyesuaian terhadap target kinerja, pembiayaan, dan prioritas pembangunan daerah.

Penyusunan dokumen ini telah melalui proses identifikasi kebutuhan, evaluasi kinerja, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait, agar dokumen ini selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta tetap mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Harapan kami, dokumen Renja Perubahan ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan kinerja perangkat daerah yang lebih optimal dan responsif terhadap perkembangan situasi.

Semoga dokumen ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Soreang, 2025

KEPALA
BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BANDUNG

ERWAN KUSUMA HERMAWAN, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720801 199703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistimatika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 12

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 14

2.4 Penelaahan Usulan Program 31

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 32

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 32

3.2 Tujuan dan Sasaran BKAD 34

3.3 Program dan Kegiatan BKAD 35

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 47

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan 47

BAB V PENUTUP 57

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Triwulan I Tahun 2025 7

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah 13

Tabel 2. 3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 15

Tabel 2. 4 T-C 31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Bandung..... 17

Tabel 2. 5 T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Bandung 31

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran BKAD 37

Tabel 3. 2 Program dan Kegiatan BKAD Tahun 2025 38

Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan 48

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja BKAD Tahun 2025 merupakan Dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang ekonomis, efektif, efisien, transparan dan akuntable di bidang keuangan daerah.

Namun demikian, Renja BKAD Tahun 2025 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BKAD Tahun 2021-2026 dan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun sebelumya serta perumusan, permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dalam penyusunan Renja BKAD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator, kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis dan penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan skala prioritas pembangunan daerah sebagai upaya penyelarasan dan sinergitas pencapaian sasaran serta target yang tertuang dalam Renstra BKAD dan RPJMD tahun yang berkenaan.

Renja BKAD Tahun 2025 merupakan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun, bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perencanaan daerah yang merupakan penerjemahan Perencanaan Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan serta Renja

menjembatani sinkronisasi, harmonisasi, Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BKAD tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang menjadi rujukan penyusunan Renja BKAD Kabupaten Bandung Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950);
2. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negerti Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2010 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;

19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah Kabupaten Bandung;
20. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 109 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 127 Tahun 2021 tentang Pedoman Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung;
23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Dokumen Renja BKAD Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Perubahan Renstra 2021-2026 dengan tujuan :

1. Meningkatkan konsistensi, transparansi, dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisiensi, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
3. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran.
4. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan BKAD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025.
5. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran serta program, kegiatan dan sub kegiatan pada BKAD Kabupaten Bandung Tahun 2025.

1.4 Sistimatika Penulisan

Pokok bahasan Renja BKAD Kabupaten Bandung tahun 2025 menjabarkan rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang disusun secara sinergi dan berkesinambungan dengan alokasi pendanaan indikatif kegiatan. Renja juga memuat kebijakan yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan ke dalam bentuk program yang berisi rangkaian kegiatan dengan tujuan yang lebih jelas dan terarah yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun. Renja BKAD Kabupaten Bandung disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : **PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB II : **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

BAB III : **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja, Serta Program dan Kegiatan

BAB IV : **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang rencanan program, kegiatan, sub kegiatan, anggaran dan indikator kinerja.

BAB V : **PENUTUP**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun kemungkinan kemungkinan ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Renja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 berpedoman pada hasil pencapaian kinerja Badan sampai dengan tahun sebelumnya, serta Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026. Berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah (PD) sampai dengan tahun 2024 Badan Keuangan Aset Daerah memiliki tingkat capaian sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Triwulan I Tahun 2025

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra BKAD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 Triw. I		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10 = 6 + 9		11 = 10/5 *100%		12
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BKAD**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP dan presentase pelayanan kesekretariatan**	**84**		**Rp 120.997.870.048**	**82,50**		**Rp 42.752.575.646,00**	**83**		**Rp 30.411.613.942,00**	**0,00**		**Rp 5.730.356.700,00**	-		**Rp 5.730.356.700,00**	-	**Rp 48.482.932.346,00**	**0,00%**	**40%**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu**	**100%**		**Rp 1.302.750.000**	**100,00**		**Rp 428.295.864,00**	**100%**		**Rp 260.550.000,00**	**0,00**		**15.377.800,00**	**57%**		**Rp 15.377.800,00**	**51%**	**443.673.664,00**	**0,51**	**34%**	**Sekretariat**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	dokumen	Rp 250.000.000	6	dok	Rp 102.078.350,00	3	dok	Rp 50.000.000,00	3,00	Dok	3.072.400,00	3,00	Dok	Rp 3.072.400,00	9,00	105.150.750,00	60,00%	42%	Sekretariat
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dokumen	Rp 62.500.000	2	dok	Rp 25.703.500,00	1	dok	Rp 12.500.000,00	0,00	Dok	2.140.800,00	-	Dok	Rp 2.140.800,00	2,00	27.844.300,00	40,00%	45%	Sekretariat
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dokumen	Rp 62.500.000	2	dok	Rp 7.568.200,00	1	dok	Rp 12.500.000,00	1,00	Dok	-	1,00	Dok	Rp -	3,00	7.568.200,00	60,00%	12%	Sekretariat
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dokumen	Rp 62.500.000	2	dok	Rp 7.852.700,00	1	dok	Rp 12.500.000,00	0,00	Dok	2.253.600,00	-	Dok	Rp 2.253.600,00	2,00	10.106.300,00	40,00%	16%	Sekretariat
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dokumen	Rp 62.500.000	2	dok	Rp 28.605.914,00	1	dok	Rp 12.500.000,00	2,00	Dok	-	2,00	Dok	Rp -	4,00	28.605.914,00	80,00%	46%	Sekretariat
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	Lap	Rp 427.750.000	8	Lap	Rp 79.157.500,00	4	dok	Rp 85.550.000,00	1,00	Lap	5.568.600,00	1,00	Lap	Rp 5.568.600,00	9,00	84.726.100,00	45,00%	20%	Sekretariat
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Lap	Rp 371.000.000	6	Lap	Rp 177.329.700,00	3	dok	Rp 73.000.000,00	1,00	Lap	2.342.400,00	1,00	Lap	Rp 2.342.400,00	7,00	179.672.100,00	46,67%	48%	Sekretariat
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2	Dokumen	Rp 2.000.000	0	0		1	dok	Rp 1.000.000,00				-		Rp -	0	-	0,00%	0%	Sekretariat
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2	Data	Rp 2.000.000	0	0		1	data	Rp 1.000.000,00				-		Rp -	0	-	0,00%	0%	Sekretariat
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu**	**100**		**Rp 81.249.138.696**		**0**	**Rp 28.804.750.165,00**	**100%**		**Rp 22.151.786.942,00**	**0,00**		**4.441.079.984,00**	**90,91%**		**Rp 4.441.079.984,00**	**58,79%**	**33.245.830.149,00**	**0,59%**	**41%**	**Sekretariat**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	356	Orang/Bula	Rp 80.295.138.696	144	Orang/ bulan	Rp 28.537.352.757,00	72	Orang/ bulan	Rp 21.981.986.942,00	68,00	Orang/bular	4.427.115.184,00	68,00	Orang/bular	Rp 4.427.115.184,00	212	32.964.467.941,00	59,55%	41%	Sekretariat
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	Rp 400.000.000	2	Laporan	Rp 90.745.508,00	1	Lap	Rp 69.200.000,00	1,00	Lap	1.796.400,00	1,00	Lap	Rp 1.796.400,00	3	92.541.908,00	60,00%	23%	Sekretariat
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20	Laporan	Rp 554.000.000	8	Laporan	Rp 176.651.900,00	4	Lap	Rp 100.600.000,00	1,00	Lap	12.168.400,00	1,00	Lap	Rp 12.168.400,00	9	188.820.300,00	45,00%	34%	Sekretariat

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra BKAD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10 = 6 + 9		11 = 10/5 *100%		12
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Presentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**100**		**Rp 24.000.000**	**0**	**0**	**Rp -**			**Rp 12.000.000,00**	**0,00**			**0,00%**		Rp -	**0**	**-**	**0**	**0%**	**Sekretariat**
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dokumen	Rp 24.000.000	0	0	Rp -	2	dok	Rp 12.000.000,00	0,00			-		Rp -	0	-	0	0%	Sekretariat
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu**	**100**		**Rp 3.070.965.000**	**200**	**0**	**Rp 326.371.100,00**	**100%**		**Rp 1.086.593.000,00**	**0,00**		**31.147.000**	**16,67%**		Rp 31.147.000,00	**42,11%**	**357.518.100,00**	**0,0042105**	**12%**	**Sekretariat**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	Paket	Rp 600.000.000	0	0		1	Paket	Rp 300.000.000,00				-		Rp -	0	-	0,00%	0%	Sekretariat
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	dokumen	Rp 178.965.000	2	dok	Rp 46.229.100,00	1	dok	Rp 40.593.000,00	1,00	Dok	2.100.000,00	1,00	Dok	Rp 2.100.000,00	3	48.329.100,00	60,00%	27%	Sekretariat
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	orang	Rp 1.092.000.000	20	orang	Rp 280.142.000,00	10	orang	Rp 146.000.000,00	1,00	Orang	29.047.000,00	1,00	Orang	Rp 29.047.000,00	21	309.189.000,00	42,00%	28%	Sekretariat
		Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	420	Orang	Rp 800.000.000	0	0		210	orang	Rp 400.000.000,00				-		Rp -	0	-	0,00%	0%	Sekretariat
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	210	Orang	Rp 400.000.000	0	0		105	orang	Rp 200.000.000,00				-		Rp -	0	-	0,00%	0%	Sekretariat
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**	**100**		**Rp 13.330.929.072**	**100**	**0**	**Rp 5.706.114.424,00**	**100%**		**Rp 2.704.926.000,00**	**0,00**		**773.570.818,00**	**28,57%**		Rp 773.570.818,00	**62,30%**	**6.479.685.242,00**	**0,62%**	**49%**	**Sekretariat**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	Rp 225.674.625	2	Paket	Rp 97.992.320,00	1	Paket	Rp 75.000.000,00	1,00	Paket	-	1,00	Paket	Rp -	3	97.992.320,00	60,00%	43%	Sekretariat
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	44	Paket	Rp 8.844.829.608	30	Paket	Rp 3.910.300.138,00	15	Paket	Rp 1.492.000.000,00	5,00	Paket	697.302.580,00	5,00	Paket	Rp 697.302.580,00	35	4.607.602.718,00	79,55%	52%	Sekretariat
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Paket	Rp 200.000.000	0	0		1	Paket	Rp 100.000.000,00	3,00			3,00		Rp -	3	-	150,00%	0%	Sekretariat
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	Rp 266.494.803	2	Paket	Rp 108.790.000,00	1	Paket	Rp 54.254.000,00	1,00	Paket	27.528.000,00	1,00	Paket	Rp 27.528.000,00	3	136.318.000,00	60,00%	51%	Sekretariat
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11	Paket	Rp 489.700.036	6	Paket	Rp 234.259.993,00	2	Paket	Rp 97.611.000,00	0,00	Paket	-	-	Paket	Rp -	6	234.259.993,00	54,55%	48%	Sekretariat
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15	dokumen	Rp 75.000.000	6	Dok	Rp 69.170.000,00	3	Dok	Rp 15.000.000,00		Dok	700.000,00	-	Dok	Rp 700.000,00	6	69.870.000,00	40,00%	93%	Sekretariat
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	53	Laporan	Rp 725.425.000	30	Laporan	Rp 175.602.900,00	12	Lap	Rp 101.500.000,00	3,00	Lap	14.864.600,00	3,00	Lap	Rp 14.864.600,00	33	190.467.500,00	62,26%	26%	Sekretariat
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44	Laporan	Rp 1.603.805.000	24	Laporan	Rp 1.109.999.073,00	12	Lap	Rp 319.561.000,00		Lap	33.175.638,00	-	Lap	Rp 33.175.638,00	24	1.143.174.711,00	54,55%	71%	Sekretariat
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Dokumen	Rp 500.000.000	0	0	Rp 206.325.000,00	1	Dok	Rp 250.000.000,00	0,00			-		Rp -	0	206.325.000,00	0,00%	41%	Sekretariat
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dokumen	Rp 400.000.000	0	0	Rp 206.325.000,00	1	Dok	Rp 200.000.000,00	1,00			1,00		Rp -	1	206.325.000,00	50,00%	52%	Sekretariat
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Presentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**		**Rp 509.745.000,00**	**0**	**0**				**Rp 9.000.000,00**				**-**		Rp -	**0**	**-**	**0,00%**	**0%**	**Sekretariat**
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3	Unit	Rp 509.745.000	0	0		1	Unit	Rp 9.000.000,00				-		Rp -	0	-	0,00%	0%	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**		**Rp 12.606.227.280**	**100**	**0**	**Rp 4.736.231.877,00**	**100%**		**Rp 2.789.260.000,00**	**0,00**		**445.434.198,00**	**17,99%**		Rp 445.434.198,00	**66,67%**	**5.181.666.075,00**	**0,67%**	**41%**	**Sekretariat**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	74	Laporan	Rp 817.816.900	44	Laporan	Rp 449.333.150,00	22	Lap	Rp 89.260.000,00	0,00	Lap	2.877.200,00	-	Lap	Rp 2.877.200,00	44	452.210.350,00	59,46%	55%	Sekretariat

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra BKAD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)				Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada I				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5				6				7				8				9				10 = 6 + 9		11 = 10/5 *100%		12
				K			Rp	K			Rp	K			Rp	K			Rp	K			Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	152	Laporan	Rp	1.997.984.700	96	Laporan	Rp	585.808.275,00	12	Lap	Rp	600.000.000,00	3,00	Lap		52.984.058,00	3,00	Lap	Rp	52.984.058,00	99	638.792.333,00	65,13%	32%	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	296	Laporan	Rp	9.790.425.680	192	Laporan	Rp	3.701.090.452,00	98	Lap	Rp	2.100.000.000,00	13,00	Lap		389.572.940,00	13,00	Lap	Rp	389.572.940,00	205	4.090.663.392,00	69,26%	42%	Sekretariat
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik**	**98%**		**Rp**	**9.437.860.000**	**0**		**Rp**	**2.544.487.216,00**	**98%**		**Rp**	**1.397.498.000,00**	**0,00**			**23.746.900,00**	**99,79%**		Rp	23.746.900,00	**26,46%**	**2.568.234.116,00**	**27,00%**	**27%**	**Sekretariat**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	139	unit	Rp	754.000.000	50	unit	Rp	172.644.578,00	29	Unit	Rp	77.000.000,00	0,00	Unit		11.686.900,00	-	Unit	Rp	11.686.900,00	50	184.331.478,00	35,97%	24%	Sekretariat
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	260	Unit	Rp	542.068.000	52	0	Rp	283.854.975,00	52	Unit	Rp	77.000.000,00	0,00	Unit		12.060.000,00	-	Unit	Rp	12.060.000,00	52	295.914.975,00	20,00%	55%	Sekretariat
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13	unit	Rp	8.141.792.000	6	Unit	Rp	2.087.987.663,00	3	Unit	Rp	1.243.498.000,00	1,00	Unit		-	1,00	Unit	Rp	-	7	2.087.987.663,00	53,85%	26%	Sekretariat
2	**OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Presentase Pengelolaan Keuangan daerah**	**100%**		**Rp**	**4.351.910.866.261**	**2**	**0**	**Rp**	**1.594.076.273.469,00**	**100%**		**Rp**	**946.468.162.056,00**	**0,00**			**122.723.490.623,00**	**34%**		**Rp**	**122.723.490.623,00**	**2,338918204**	**1.716.799.764.092,00**	**233,89%**	**39%**	
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Persentase Program Dalam Dokumen Perencanaan Yg Terangarkan**	**100%**		**Rp**	**11.647.432.643**	**2**	**0**	**Rp**	**4.717.610.721,00**	**100%**		**Rp**	**2.064.675.000,00**	**0,00**			**149.573.900,00**	**26,02%**		Rp	149.573.900,00	**196,77%**	**4.867.184.621,00**	**196,77%**	**42%**	**Bidang Anggaran**
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	10	dokumen	Rp	758.683.900	4	dok	Rp	211.733.575,00	2	dok	Rp	135.985.000,00	0,00			-	-		Rp	-	4	211.733.575,00	40,00%	28%	Bidang Anggaran
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	10	dokumen	Rp	566.939.060	4	dok	Rp	177.780.600,00	2	dok	Rp	97.815.000,00	0,00			-	-		Rp	-	4	177.780.600,00	40,00%	31%	Bidang Anggaran
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	65	Dok	Rp	1.489.397.490	130	Dok	Rp	555.534.200,00	65	dok	Rp	214.500.000,00	0,00			30.362.500,00	-		Rp	30.362.500,00	130	585.896.700,00	200,00%	39%	Bidang Anggaran
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	65	Dok	Rp	852.295.000	130	Dok	Rp	470.549.080,00	65	dok	Rp	80.750.000,00	68,00	Dok		-	68,00	Dok	Rp	-	198	470.549.080,00	304,62%	55%	Bidang Anggaran
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	65	Dok	Rp	359.750.000	130	Dok	Rp	1.500.000,00	65	dok	Rp	114.500.000,00	0,00	Dok			-	Dok	Rp	-	130	1.500.000,00	200,00%	0%	Bidang Anggaran
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	65	Dok	Rp	246.127.100	130	Dok	Rp	6.064.000,00	65	dok	Rp	52.093.000,00	0,00	Dok		1.402.000,00	-	Dok	Rp	1.402.000,00	130	7.466.000,00	200,00%	3%	Bidang Anggaran
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10	dokumen	Rp	2.272.268.433	4	dok	Rp	1.404.567.019,00	2	dok	Rp	437.200.000,00	0,00			1.060.000,00	-		Rp	1.060.000,00	4	1.405.627.019,00	40,00%	62%	Bidang Anggaran
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10	dokumen	Rp	2.159.996.490	4	dok	Rp	921.030.850,00	2	dok	Rp	371.406.000,00	2,00	Dok		98.763.500,00	2,00	Dok	Rp	98.763.500,00	6	1.019.794.350,00	60,00%	47%	Bidang Anggaran
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	10	dokumen	Rp	2.941.975.170	4	dok	Rp	968.851.397,00	1	dok	Rp	560.426.000,00	0,00	Dok		17.985.900,00	-	Dok	Rp	17.985.900,00	4	986.837.297,00	40,00%	34%	Bidang Anggaran
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Tingkat Likuidatas Keuangan Daerah**	**100%**		**Rp**	**2.670.325.000**	**2**	**0**	**Rp**	**1.121.451.454,00**	**100%**		**Rp**	**466.065.000,00**	**0,00**			**292.519.660,00**	**142,22%**		Rp	292.519.660,00	**70%**	**1.413.971.114,00**	**70,09%**	**53%**	**Bidang Perbendaharaan**
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	7	dokumen	Rp	382.730.000	2	dok	Rp	312.637.836,00	2	dok	Rp	66.546.000,00	9,00	Dok		6.100.000,00	9,00	Dok	Rp	6.100.000,00	11	318.737.836,00	157,14%	83%	Bidang Perbendaharaan
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	9	dokumen	Rp	376.260.000	2	dok	Rp	135.565.100,00	3	dok	Rp	65.252.000,00	3,00	Dok		4.096.500,00	3,00	Dok	Rp	4.096.500,00	5	139.661.600,00	55,56%	37%	Bidang Perbendaharaan
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	686	Orang	Rp	1.911.335.000	296	Orang	Rp	673.248.518,00	130	Orang	Rp	334.267.000,00	180,00	Orang		282.323.160,00	180,00	Orang	Rp	282.323.160,00	476	955.571.678,00	69,39%	50%	Bidang Perbendaharaan

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra BKAD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10 = 6 + 9		11 = 10/5 *100%		12
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Persentase PD yang Telah mengelola keuangan sesuai SAP**	**100%**		**Rp 3.603.977.300**	**2**	**0**	**Rp 1.175.549.327,00**	**100%**	-	**Rp 703.584.000,00**	**0,00**		**25.264.800,00**	**1,21%**		Rp 25.264.800,00	**41%**	**1.200.814.127,00**	**40,51%**	**33%**	**Bidang AKLAP**
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	5	dokumen	Rp 434.595.000	2	dok	Rp 140.128.600,00	1	dok	Rp 78.810.000,00	1,00	Dok	25.264.800,00	1,00	Dok	Rp 25.264.800,00	3	165.393.400,00	60,00%	38%	Bidang AKLAP
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	10	Laporan	Rp 874.576.600	4	Laporan	Rp 239.641.380,00	2	Laporan	Rp 184.566.000,00	0,00	Lap	-	-	Lap	Rp -	4	239.641.380,00	40,00%	27%	Bidang AKLAP
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	11	dokumen	Rp 761.582.100	5	Dok	Rp 200.403.797,00	2	Dok	Rp 129.688.000,00	0,00	Dok	-	-	Dok	Rp -	5	200.403.797,00	45,45%	26%	Bidang AKLAP
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	13	dokumen	Rp 568.482.700	6	Dok	Rp 199.395.650,00	2	Dok	Rp 113.215.000,00	2,00	Dok	-	2,00	Dok	Rp -	8	199.395.650,00	61,54%	35%	Bidang AKLAP
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	830	Orang	Rp 964.740.900	332	Orang	Rp 395.979.900,00	240	Orang	Rp 197.305.000,00	0,00	Orang	-	-	Orang	Rp -	332	395.979.900,00	40,00%	41%	Bidang AKLAP
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Persentase Bantuan Keuangan dan BTT**	**100%**		**Rp 4.333.459.721.318**	**2**	**0**	**Rp 1.586.751.740.167,00**	**100%**	-	**Rp 943.180.800.056,00**	**0,00**		**122.256.132.263,00**	**0%**		Rp 122.256.132.263,00	**40%**	**1.709.007.872.430,00**	**40,00%**	**39%**	
		Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	5	dokumen	Rp 370.000.000	2	dok	Rp -	1	dok	Rp -	0,00	Dok	-	-		Rp -	2	-	40,00%	0%	Sekretariat
		Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	20	Laporan	Rp 830.000.000	8	laporan	Rp 249.417.000,00	4	laporan	Rp 80.000.000,00	0,00	Lap	-	-	Lap	Rp -	8	249.417.000,00	40,00%	30%	Bidang Anggaran
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5	laporan	Rp 1.351.367.192.200	2	laporan	Rp 724.752.675.144,00	1	laporan	Rp 751.787.786.112,00	0,00	Lap	114.203.481.377,00	-	Lap	Rp 114.203.481.377,00	2	838.956.156.521,00	40,00%	62%	Sekretariat
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5	Laporan	Rp 347.142.600.868	2	laporan	Rp 69.915.254.829,00	1	laporan	Rp 60.000.000.000,00	0,00	Lap	5.740.656.486,00	-	Lap	Rp 5.740.656.486,00	2	75.655.911.315,00	40,00%	22%	Sekretariat
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	5	Laporan	Rp 2.633.749.928.250	2	laporan	Rp 791.834.393.194,00	1	laporan	Rp 131.313.013.944,00	0,00	Lap	2.311.994.400,00	-	Lap	Rp 2.311.994.400,00	2	794.146.387.594,00	40,00%	30%	Sekretariat
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	**Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD**	**830**	**Orang**	**Rp 529.410.000**	**332**	**Orang**	**Rp 309.921.800,00**	100	Orang	**Rp 53.038.000,00**	**0,00**	**Orang**	**-**	**0%**	**Orang**	Rp -	**40%**	**309.921.800,00**	**40,00%**	**59%**	**Bidang AKLAP**
		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	830	Orang	Rp 529.410.000	332	Orang	Rp 309.921.800,00	100	Orang	Rp 53.038.000,00	0,00	Orang	-	-	Orang	Rp -	332	309.921.800,00	40,00%	59%	Bidang AKLAP
3	**OPTIMALISASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan baik**	**95%**		**Rp 8.521.489.177**	**99**	**0**	**Rp 4.183.890.801,00**	**95,00**	-	**Rp 1.487.944.000,00**	**0,00**		**260.290.265,00**	**95%**		**Rp 260.290.265,00**	**99%**	**4.444.181.066,00**	**104,21%**	**52%**	**Bidang BMD**
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	5	dokumen	Rp 1.463.000.000	2	dok	Rp 738.470.640,00	1	dok	Rp 281.620.000,00	0,00	Dok	40.731.000,00	-	Dok	Rp 40.731.000,00	2	779.201.640,00	40,00%	53%	Bidang BMD
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	10	dokumen	Rp 599.200.000	4	dok	Rp 253.560.200,00	2	dok	Rp 130.820.000,00	0,00	Dok	4.080.000,00	-	Dok	Rp 4.080.000,00	4	257.640.200,00	40,00%	43%	Bidang BMD
		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3	Dokumen	Rp 152.000.000	0	0	Rp -	1	dok	Rp 1.000.000,00	0,00	Dok	5.465.000,00	-	Dok	Rp 5.465.000,00	0	5.465.000,00	0,00%	4%	Bidang BMD

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra BKAD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10 = 6 + 9		11 = 10/5 *100%		12
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3	Laporan	Rp 102.000.000	0	0	Rp -	1	laporan	Rp 1.000.000,00	0,00	Lap	-	-	Lap	Rp -	0	-	0,00%	0%	Bidang BMD
		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5	dokumen	Rp 1.272.260.000	2	laporan	Rp 460.270.100,00	1	laporan	Rp 253.252.000,00	0,00	Lap	40.311.465,00	-	Lap	Rp 40.311.465,00	2	500.581.565,00	40,00%	39%	Bidang BMD
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5	dokumen	Rp 1.526.260.000	2	dok	Rp 794.013.530,00	1	dok	Rp 305.252.000,00	0,00	Dok	15.000.000,00	-	Dok	Rp 15.000.000,00	2	809.013.530,00	40,00%	53%	Bidang BMD
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	10	Laporan	Rp 3.406.769.177	4	laporan	Rp 1.937.576.331,00	2	laporan	Rp 515.000.000,00	0,00	Lap	154.702.800,00	-	Lap	Rp 154.702.800,00	4	2.092.279.131,00	40,00%	61%	Bidang BMD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan tugas dan pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung, keberhasilan capaian kinerja suatu program, kegiatan, sub kegiatan sangat dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal yang berdampak pada capaian kinerja pelayanan.

Berdasarkan Tabel 2. 2 dapat disimpulkan jika tahun pertama rata-rata capaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja BKAD dapat dicapai dengan baik, dan untuk tahun kedua capaian tujuan, sasaran dari setiap indikator kinerja dapat dicapai sesuai target dan dapat di kategorikan baik.

Pada indikator nilai akuntabilitas kinerja pada tahun pertama periode RPJMD dapat di capai sesuai dengan target dengan realiasi sebesar 80.15 atau melebihi target sebesar 0.15. sedangkan di tahun kedua indikator ini belum dapat dicapai sesuai dengan target. Realisasi tahun 2024 sebesar 82,50 memiliki selisih 0,05 dengan target yang ditentukan.

Indikator kedua yaitu Persentase Aset Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik, pada tahun 2022 capaian ini tidak dapat dicapai sesuai dengan target. Pada tahun ini capaian yang dapat diraih yaitu sebesar 85% dan memiliki selisih 8% dengan target yang ditentukan, namun terjadi peningkatan kinerja pada tahun 2024 dimana capaian ini dapat terealisasi sebesar 99,79% dan melebihi target yang ditentukan sebesar 6,79%. Capaian kinerja dari indikator ini mengalami peningkatan yang cukup baik.

Indikator sasaran ketiga yaitu Persentase Program dalam Dokumen Perencanaan yang teranggarkan pada tahun pertama yaitu 2022 capaian sasaran ini dapat dicapai dengan baik, bahkan melebihi target sebesar 2% diatas target. Hal ini dikarenakan adanya penambahan 3 program pada RAPBD. Pada tahun 2024 pelaksanaan RPJMD indikator ini meraih capaian sesuai dengan target yang ditentukan yaitu sebesar 100%. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan jika kinerja dalam pencapaian indikator Persentase Program dalam Dokumen Perencanaan yang teranggarkan dapat diraih dengan baik.

Tabel 2. 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra BKAD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2024	2025	2026	
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKAD	-	-	80	81	82	83	84	80,15	80,45	82,50	82	83	84	
2.	Persentase Aset yang terkelola dengan baik	-	-	93%	93%	93%	93%	93%	85%	99%	99,79%	98%	98%	93%	
3.	Persentase Program Dalam Dokumen Perencanaan yang Teranggarkan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	102%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	Tingkat Likuiditas keuangan Pemerintah Daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.	Peresentase PD yang telah menyusun Laporan keuangan sesuai SAP	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.	Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan Baik	-	-	95%	95%	95%	95%	95%	95%	99%	95%	95%	95%	95%	

Indikator sasaran keempat mengenai tingkat likuiditas pengelolaan keuangan, dapat terlaksana dengan baik, hal ini bisa dilihat dari Tingkat Likuiditas Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun pertama sampai tahun keempat periode RPJMD dapat diraih sesuai dengan target dan dicapai dengan maksimal dengan tingkat capaian 100%.

Indikator sasaran untuk Persentase PD yang telah Menyusun Laporan Keuangan Sesuai SAP dalam dua tahun terakhir dicapai dengan maksimal. Pencapaian ini ditandai dengan seluruh Perangkat Daerah sudah menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut capaian pada indikator ini tercapai dengan baik yaitu 100% dari tahun pertama sampai tahun keempat periode RPJMD.

Indikator keenam yang mengampu program pengelolaan barang milik daerah memiliki indikator sasaran yaitu Persentase PD yang telah mengelola BMD dengan baik. Capaian indikator ini pada tahun 2022 yaitu sebesar 95% dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 99%, terjadi penigkatan sebesar 4%. Kemudian realisasi pada tahun 2024 kembali mencapai 95%. Capaian realisasi ini juga menunjukan tren yang baik dalam urusan pengelolaan barang milik daerah yang menunjukan semakin tertibnya Perangkat Daerah dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah.

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana telah dikemukakan di Renstra bahwa dalam menjalankan fungsi pelayanan, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menghadapi beberapa isu strategis yang harus diantisipasi dan dikelola. Isu- isu strategis tersebut dapat menjadi hambatan maupun peluang bagi BKAD dalam melaksanakan dan meningkatkan pelayanan dan berpengaruh secara langsung terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BKAD. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang tidak boleh diabaikan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dapat di identifikasikan dari permasalahan-permasalahan yang dapat diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2. 3
Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Jumlah sumber daya aparatur belum sesuai dengan kebutuhan	Masih terdapat beberapa kekosongan jabatan	Rekrutmen pegawai belum sepenuhnya sesuai usulan kebutuhan
2	Masih adanya kendala dalam pengoperasian aplikasi yang menunjang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;	Tidak terakomodirnya kebutuhan tahapan yang berlaku sesuai aturan	Belum lengkapnya fitur-fitur pada aplikasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
3	Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.	Masih terjadinya kesalahan dalam penganggaran, penatausahaan dan peLaporan keuangan dan barang milik daerah	Minimnya pemahaman Perangkat Daerah terkait pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
4	Belum optimalnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	perubahan regulasi yang cepat dan dinamis

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RENJA berpedoman pada Renstra BKAD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan. Penyusunan RENJA merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD Perubahan, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD Perubahan. Rencana Kerja BKAD merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) BKAD. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan harus selaras dengan Rancangan RKPD Perubahan.

Pada tabel 2.4 T-C 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Bandung terdapat beberapa perbedaan pagu total anggaran antara Rancangan Awal dengan Rancangan Akhir RKPD pada tahun anggaran 2025. Perbedaan tersebut dikarenakan terdapat kondisi yang berubah sesuai pagu belanja yang belum di anggarkan pada Rancangan Awal RKPD serta melakukan beberapa penyesuaian pada dokumen Renja Akhir.

Tabel 2. 4 T-C 31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Bandung

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					943.691.008.717,17					**1.042.087.603.176,68**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Nilai AKIP	83 Poin	**45.117.617.679,17**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Nilai AKIP	83 Poin	**50.491.376.864,77**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Persentase Dokume Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	**231.056.800,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Persentase Dokume Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	**231.056.800,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	15.647.500,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	15.647.500,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.077.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.077.600,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9.413.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9.413.600,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9.791.600,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9.791.600,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.700.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.700.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	111.389.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	111.389.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	30.800.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	30.800.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	13.237.500,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	13.237.500,00	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	21.000.000,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	21.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	**100%**	**33.791.638.278,17**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	**100%**	**39.165.397.463,77**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	33.733.936.178,17	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	39.107.695.363,77	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	26.692.900,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	26.692.900,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	31.009.200,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	31.009.200,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	4.180.000,00	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**100 persen**	4.180.000,00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	4.180.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	4.180.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	**100%**	749.711.749,00	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	**100%**	749.711.749,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	446.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	446.000.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	7.744.700,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	7.744.700,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bandung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	88.461.449,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bandung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	88.461.449,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	210 Orang	7.505.600,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	41 Orang	7.505.600,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	105 Orang	200.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	105 Orang	200.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**	**100%**	**3.977.133.676,00**	**Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**		Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	**100%**	**3.977.133.676,00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	79.094.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	79.094.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	2.003.446.918,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	2.003.446.918,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bandung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	250.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bandung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	250.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	334.009.800,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	334.009.800,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bandung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.075.900,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bandung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.075.900,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	80.600.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	80.600.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	102.510.524,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	102.510.524,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	74.887.034,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	74.887.034,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	502.509.500,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	502.509.500,00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	500.000.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	500.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	**100%**	**36.538.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	**100 persen**	**36.538.000,00**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	36.538.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	36.538.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100%**	**4.099.015.876,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100 persen**	**4.099.015.876,00**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	89.260.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	89.260.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	631.621.940,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	631.621.940,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	3.378.133.936,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.378.133.936,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	98 persen	2.228.343.300,00	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	**98 persen**	**2.228.343.300,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 Unit	200.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29 Unit	200.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	127 Unit	290.450.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	127 Unit	290.450.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.737.893.300,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.737.893.300,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
					45.117.617.679,17					50.491.376.864,77	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	**100 %**	896.452.862.688,00	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	**100 %**	**989.475.697.961,91**	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase Program Dalam Dokumen Perencanaan yang teranggarkan	**100 %**	1.291.818.650,00	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**		Persentase Program Dalam Dokumen Perencanaan yang teranggarkan	**100 %**	**1.291.818.650,00**	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	97.814.000,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	97.814.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	82.047.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	82.047.500,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	65 Dokumen	167.177.650,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	68 Dokumen	167.177.650,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	65 Dokumen	115.375.500,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	68 Dokumen	115.375.500,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	65 Dokumen		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	68 Dokumen	0,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	65 Dokumen		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	68 Dokumen	0,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Bandung	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	213.480.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Bandung	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	213.480.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Bandung	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	240.903.300,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Bandung	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	240.903.300,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	375.020.700,00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	375.020.700,00	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Tingkat Likuiditas Keuangan Daerah	**100 %**	**543.297.900,00**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**		Tingkat Likuiditas Keuangan Daerah	**100 %**	**543.297.900,00**	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	23.273.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	8 Dokumen	23.273.000,00	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	3 Dokumen	35.409.500,00	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	12 Dokumen	35.409.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	130 Orang	484.615.400,00	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	130 Orang	484.615.400,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase PD yang telah Mengelola Keuangan sesuai SAP	100 %	781.666.060,00	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**		Persentase PD yang telah Mengelola Keuangan sesuai SAP	100 %	**781.666.060,00**	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	59.677.500,00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	59.677.500,00	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	128.994.650,00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	128.994.650,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	81.744.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	81.744.000,00	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	**111.142.300,00**	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	111.142.300,00	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	166 Orang	**400.107.610,00**	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	435 Orang	400.107.610,00	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Bantuan Keuangan dan BTT	**100 %**	**893.655.165.128,00**	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		Persentase Bantuan Keuangan dan BTT	**100 %**	**986.678.000.401,91**	
	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	-	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	4 Laporan	375.000.000,00	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	4 Laporan	375.000.000,00	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	730.166.168.157,00	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	809.479.545.089,70	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	25.112.643.914,00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	37.490.479.187,91	
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	138.001.353.057,00	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	139.332.976.124,30	
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD	**100 orang**	180.914.950,00	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**		Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD	**190 orang**	**180.914.950,00**	
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	166 Orang	180.914.950,00	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	190 Orang	180.914.950,00	
3	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		Persentase Perangkat Daerah yang telah Mengelola BMD dengan baik	**95 %**	**2.120.528.350,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		Persentase Perangkat Daerah yang telah Mengelola BMD dengan baik	**95 %**	**2.120.528.350,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan baik	**95 %**	**2.120.528.350,00**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**		Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan baik	**95 %**	**2.120.528.350,00**	
	Penyusunan Standar Harga	Kab. Bandung	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	246.575.300,00	Penyusunan Standar Harga	Kab. Bandung	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	246.575.300,00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	115.215.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	115.215.000,00	
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	378.450.000,00	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	378.450.000,00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	131.050.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	131.050.000,00	
	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	232.138.325,00	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	232.138.325,00	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	368.220.475,00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	368.220.475,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	648.879.250,00	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	648.879.250,00	

2.4 Penelaahan Usulan Program

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung telah ditelaah bahwa Program dan Kegiatan terakomodir secara keseluruhan untuk Tahun Anggaran 2025. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam rumusan kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2025 hasil Review Rancangan Akhir RKPD pada tabel dibawah ini.

Dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2021, Badan Keuangan dan Aset Daerah Daerah memiliki peran penting dalam pencapaian kinerja akuntabilitas kinerja dan keuangan, good governance, clean government dan pelayanan publik, serta kegiatan penunjang pengawasan lainnya. Inspektorat Daerah akan menyempurnakan usulan program dan kegiatan sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat dan kondisi peraturan perundang-undangan jika mengalami perubahan dengan mengurangi ataupun menambah kegiatan yang sudah ada. Tahun ini, Inspektorat daerah tidak menambah kegiatan.

Tabel 2. 5 T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Bandung

NO	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Ketentuan Pasal 159 dan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa penelaahan terhadap Dokumen perencanaan pembangunan Nasional dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh Daerah. Mempedomani RPJMN dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Penelaahan isu strategis nasional juga perlu diperhatikan dalam menyusun isu strategis daerah. Pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2030 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Visi “Indonesia Emas 2045” serta 8 misi yang dikenal dengan Asta Cita yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi arah kebijakan ini adalah:

- Bonus demografi yang berlangsung hingga 2035;
- Transformasi digital yang makin mendalam di berbagai sektor;
- Tantangan global seperti perubahan iklim, geopolitik, dan krisis pangan-energi;
- Pemulihan pascapandemi serta penguatan ketahanan nasional.

Beberapa fokus utama dalam kebijakan nasional 2025–2030 meliputi:

a. Pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK, dengan fokus pada pendidikan vokasi, literasi digital, dan kualitas kesehatan.
b. Transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan, melalui hilirisasi industri, ekonomi hijau, dan pemberdayaan UMKM.
c. Penguatan ketahanan nasional, termasuk ketahanan pangan, energi, dan pertahanan siber.
d. Pemerataan pembangunan, dengan memperkuat peran daerah, mempercepat konektivitas infrastruktur, dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Aspek	Dampak terhadap perencanaan Daerah
Sinkronisasi dokumen perencanaan	RPJMD dan RKPD daerah wajib diselaraskan dengan RPJMN dan RKP melalui musrenbang nasional dan regional. Pemerintah pusat mengeluarkan pedoman teknis penyusunan dokumen daerah.
Prioritas pembangunan daerah	Daerah diarahkan menyesuaikan program prioritas lokal dengan 7 Prioritas Nasional (PN) atau Tujuan Pembangunan Nasional, seperti SDM unggul, ketahanan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur.

Pendanaan	Arah transfer ke daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) akan ditentukan berdasarkan capaian indikator nasional dan prioritas pusat. Daerah dengan kinerja sinergi yang tinggi cenderung memperoleh alokasi lebih besar.
Pemanfaatan sistem digital nasional	Sistem informasi perencanaan dan pelaporan (seperti KRISNA, SIPD, SAKIP) wajib digunakan daerah, memperkuat keterhubungan antara pusat-daerah.
Pemetaan wilayah prioritas	Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kawasan strategis nasional (KSPN/KPPN) mendapat perhatian khusus dari kebijakan pusat. Daerah perlu menyesuaikan RPJMD agar selaras dengan strategi pusat.

3.2 Tujuan dan Sasaran BKAD

Berdasarkan penelaahan terhadap Rancangan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025-2030, terkait serta hasil identifikasi terhadap permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Bandung, maka dibutuhkan perumusan Visi Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai pedoman arah kebijkan lima tahun mendatang. Visi Kabupaten Bandung di bawah kepemimpinan periode kedua Bapak DR. H.M. Dadang Supriatna, S.Ip. M.Si. adalah ”TERWUJUDNYA KABUPATEN BANDUNG LEBIH BANGKIT, EDUKATIF, DINAMIS, AGAMIS, SEJAHTERA (BEDAS) MAJU, DAN BERKELANJUTAN MENUJU INDONESIA EMAS”.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan 5 (lima) misi yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia berakhlak dan berkarakter dengan didukung keberpihakan penguatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan mendorong perlindungan bagi anak;

2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik guna mewujudkan pelayanan publik yang partisipatif, transparan, dan akuntabel;
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan;
5. Menjaga stabilitas, ketentraman, dan ketertiban umum;
6. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Visi tersebut kemudian dijabarkan kedalam misi-misi yang ada pada Kabupaten Bandung. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung, dalam hal ini berperan dalam pencapaian Misi Ke-3 (Empat) yaitu : "Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel".

Setelah Penjabaran Visi dan Misi yang ada pada Kabupaten Bandung, Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tujuan yaitu :
"MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KINERJA ORGANISASI DAN TERCAPAINYA OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH".
Untuk Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai sasaran sebagai berikut :
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan BKAD;
2. Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah;
3. Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berikut secara detail tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung dapat dilihat pada **Tabel 3.1**.

3.3 Program dan Kegiatan BKAD

Rencana Program dan Kegiatan merupakan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan yang menjabarkan secara operasional arah kebijakan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan yang direncanakan mencerminkan prioritas pembangunan daerah

dan telah disusun dengan mempertimbangkan sinkronisasi antara kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta mempedomani Rencana Strategis BKAD Tahun 2025-2030. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan kelompok sasaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Melalui perencanaan program dan kegiatan yang terarah dan terintegrasi, diharapkan mampu mempercepat pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat secara berkelanjutan.

Tahun 2025 BKAD mengampu 3 Program dan 14 dan 65 Sub Kegiatan Kegiatan sebagaimana tercantum pada **Tabel 3.2**.

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran BKAD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKAD	83	84	84,5	85	85,5	86
			Persentase aset yang terkelola dengan Baik	98%	98%	98%	98%	98%	98%
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Meningkatnya Tata kelola anggaran	Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	33%	32%	30%	30%	30%	30%
			Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	34%	34%	40%	40%	40%	40%
		Meningkatnya Tata kelola Perbendaharaan	Persentase realisasi anggaran urusan wajib pelayanan dasar	94%	95%	95%	95%	95%	95%
			Persentase penuruan SILPA	0,76%	1,27%	1,28%	1,30%	1,32%	1,32%
		Meningkatnya Tata Kelola akutansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Menungkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap		6%	6%	6%	6%	6%

Tabel 3. 2
Program dan Kegiatan BKAD Tahun 2025

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
5.02	**Keuangan**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP dan presentase pelayanan kesekretariatan**
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu**
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
5.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu**
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu**
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Presentase Pengelolaan Keuangan daerah**
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase Program Dalam Dokumen Perencanaan Yg Terangarkan**
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Tingkat Likuidatas Keuangan Daerah**
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase PD yang Telah mengelola keuangan sesuai SAP**
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Bantuan Keuangan dan BTT**
5.02.02.2.04.0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah
5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
5.02.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD**
5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan Baik**
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan baik**
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung berisi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung pencapaian sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Bupati maupun penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung .

Rencana Kerja berupa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada BKAD tahun anggaran 2025 Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Rencana Kerja dan Pendanaan

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Unit Penanggung jawab	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**1.042.087.603.176,68**
5.02	**Keuangan**				**1.042.087.603.176,68**
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP dan presentase pelayanan kesekretariatan**		**83 Poin**	**50.491.376.864,77**
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu**		**100%**	**231.056.800,00**
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat	3 Dokumen	15.647.500,00
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sekretariat	1 Dokumen	9.077.600,00
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sekretariat	1 Dokumen	9.413.600,00
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sekretariat	1 Dokumen	9.791.600,00
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sekretariat	1 Dokumen	10.700.000,00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Unit Penanggung jawab	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat	4 Laporan	111.389.000,00
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat	3 Laporan	30.800.000,00
5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Sekretariat	1 Dokumen	13.237.500,00
5.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Sekretariat	1 Data	21.000.000,00
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu**		**100%**	**39.165.397.463,77**
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat	72 Orang/ Bulan	39.107.695.363,77
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sekretariat	1 Laporan	26.692.900,00
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Sekretariat	4 Laporan	31.009.200,00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Unit Penanggung jawab	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**		**100%**	**4.180.000,00**
5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sekretariat	2 Dokumen	4.180.000,00
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu**		**100%**	**749.711.749,00**
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sekretariat	1 Paket	446.000.000,00
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sekretariat	1 Dokumen	7.744.700,00
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sekretariat	50 Orang	88.461.449,00
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Sekretariat	41 Orang	7.505.600,00
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat	105 Orang	200.000.000,00
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**		**100%**	**3.977.133.676,00**
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sekretariat	1 Paket	79.094.000,00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Unit Penanggung jawab	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sekretariat	23 Paket	2.003.446.918,00
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sekretariat	1 Paket	250.000.000,00
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sekretariat	1 Paket	334.009.800,00
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sekretariat	1 Paket	50.075.900,00
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sekretariat	3 Dokumen	80.600.000,00
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sekretariat	12 Laporan	102.510.524,00
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat	12 Laporan	74.887.034,00
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sekretariat	1 Dokumen	502.509.500,00
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sekretariat	1 Dokumen	500.000.000,00
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**36.538.000,00**

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Unit Penanggung jawab	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Sekretariat	1 Unit	36.538.000,00
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**4.099.015.876,00**
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat	12 Laporan	89.260.000,00
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sekretariat	12 Laporan	631.621.940,00
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sekretariat	12 Laporan	3.378.133.936,00
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**		**98%**	**2.228.343.300,00**
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sekretariat	29 Unit	200.000.000,00
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sekretariat	127 Unit	290.450.000,00
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sekretariat	3 Unit	1.737.893.300,00
JUMLAH 1					**50.491.376.864,77**
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Presentase Pengelolaan Keuangan daerah**		**100%**	**989.475.697.961,91**

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Unit Penanggung jawab	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase Program Dalam Dokumen Perencanaan Yg Terangarkan**		**100%**	**1.291.818.650,00**
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Bid. Anggaran	2 Dokumen	97.814.000,00
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Bid. Anggaran	2 Dokumen	82.047.500,00
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Bid. Anggaran	68 Dokumen	167.177.650,00
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Bid. Anggaran	68 Dokumen	115.375.500,00
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Bid. Anggaran	68 Dokumen	0,00
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Bid. Anggaran	68 Dokumen	0,00
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Bid. Anggaran	2 Dokumen	213.480.000,00
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Bid. Anggaran	2 Dokumen	240.903.300,00
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Bid. Anggaran	2 Dokumen	375.020.700,00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Unit Penanggung jawab	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Tingkat Likuidatas Keuangan Daerah**		**100%**	**543.297.900,00**
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Bid. Perbendaharaan	8 Dokumen	23.273.000,00
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Bid. Perbendaharaan	12 Dokumen	35.409.500,00
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Bid. Perbendaharaan	130 Orang	484.615.400,00
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase PD yang Telah mengelola keuangan sesuai SAP**		**100%**	**781.666.060,00**
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Bid. AKLAP	1 Dokumen	59.677.500,00
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Bid. AKLAP	2 Laporan	128.994.650,00
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Bid. AKLAP	2 Dokumen	81.744.000,00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Unit Penanggung jawab	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bid. AKLAP	3 Dokumen	111.142.300,00
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Bid. AKLAP	435 Orang	400.107.610,00
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Bantuan Keuangan dan BTT**		**100%**	**986.678.000.401,91**
5.02.02.2.04.0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Sekretariat	1 Dokumen	0,00
5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Bid. Anggaran	4 Laporan	375.000.000,00
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Sekretariat	12 Laporan	809.479.545.089,70
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Sekretariat	1 Laporan	37.490.479.187,91
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Sekretariat	1 Laporan	139.332.976.124,30
5.02.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD**		**190 Orang**	**180.914.950,00**
5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bid. AKLAP	190 Orang	180.914.950,00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Unit Penanggung jawab	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan Baik**		**95,00%**	**2.120.528.350,00**
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan baik**		**95,00%**	**2.120.528.350,00**
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Bid. BMD	1 Dokumen	246.575.300,00
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Bid. BMD	2 Dokumen	115.215.000,00
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bid. BMD	1 Dokumen	378.450.000,00
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Bid. BMD	1 Laporan	131.050.000,00
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Bid. BMD	1 Laporan	232.138.325,00
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Bid. BMD	1 Dokumen	368.220.475,00
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bid. BMD	2 Laporan	648.879.250,00
JUMLAH 2					**991.596.226.311,91**
JUMLAH 1+ JUMLAH 2					**1.042.087.603.176,68**

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Bandan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung merupakan bentuk rencana yang akan dilaksanakan serta dipertanggungjawabkan dari serangkaian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran BKAD Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) BKAD Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang telah disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan yang terjadi, baik dari sisi kebijakan nasional, kebijakan daerah, maupun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Perubahan Renja ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel demi mewujudkan pencapaian target pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung.

Akhirnya, semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan menjadi dasar dalam perencanaan serta penganggaran yang lebih baik.

KEPALA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

ttd

ERWAN KUSUMA HERMAWAN

BUPATI BANDUNG

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

FORM E.70
PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

No	Dokumen Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Tidak Kesesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	✓			
2	Pengolahan Data dan Informasi	✓			
3	Analis gambaran pelayanan perangkat daerah kabupaten	✓			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja perangkat daerah kabupaten tahun lalu berdasarkan Renstra perangkat daerah	✓			
5	Penentuan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	✓			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD	✓			
7	Perumusan tujuan, susuran, indikator, dan target kinerja	✓			
8	Penelaahan usulan masyarakat		✓	Tidak melaksanakan musrenbang	
9	Perumusan kegiatan prioritas	✓			
10	Pelaksanaan forum perangkat daerah kabupaten	✓			
10a	Menyelaras program dan kegiatan perangkat daerah provinsi dengan usulan program dan kegaitan hasil Musrenbang kecamatan		✓	Tidak melaksanakan musrenbang	
10b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuian dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	✓			

No	Dokumen Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Tidak Kesesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
10c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuia dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	✓			
10d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah sesuai SE Kepala Daerah	✓			
11	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	✓			
12	Program dan kegiatan antara perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah	✓			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	✓			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten yang telah disahkan	✓			

Soreang, 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ERWAN KUSUMA HERMAWAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720801 199703 1 004